

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH YANG DIMODERASI BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

By Mar'atus Solikah

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH YANG DIMODERASI BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Linawati¹

linawati@unpkediri.ac.id

Mar'atus Solikah²

solikah@unpkediri.ac.id

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, UN PGRI Kediri

Abstrak

Kinerja keuangan yang terencana, dengan estimasi dan realisasi pendapatan dan ketepatan pengalokasian belanja, diharapkan terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menandakan bahwa kegiatan perekonomian suatu daerah meningkat yang diikuti dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun kinerja keuangan diduga tidak selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimoderasi belanja modal pada Kota dan Kabupaten Sekeks Karesidenan Kediri. Populasi sekaligus sampel penelitian ini adalah 7 daerah, yaitu 2 kota dan 5 kabupaten di karesidenan Kediri Jawa Timur. Obyek penelitian adalah kinerja keuangan daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas data anggaran realisasi APBD dan pertumbuhan ekonomi, yang didapat dari website bps dan dpjk. Analisis data menggunakan analisis *Moderating SEM*. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal dapat sebagai moderator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal.

Abstract

Planned financial performance, with estimates and realization of revenues and accuracy of expenditure allocation, is expected to increase economic growth. Increased economic growth indicates increased the economic activities of that area, followed by increasing income and welfare of its people. The financial performance is allegedly not always increasing economic growth. The purpose of this study was to analyze the effect of regional financial performance on economic growth which moderated capital expenditure in the City and Regency of the Ex-Kediri Residency. The population as well as the sample in this study are 7 regions, namely 2 cities and 5 districts in the Kediri residency of Ex-Kediri, Java. The object of research is regional financial performance, capital expenditure and economic growth. The data used is secondary data, consisting of budget data on APBD realization and economic growth, obtained from the bps and dpjk websites. Data analysis using SEM Moderating analysis. This study has found that financial performance does not have a significant and negative effect on economic growth. Capital expenditure has a significant negative effect on economic growth, and capital expenditure can be as a moderator regional financial performance towards economic growth.

Keywords: economic growth, capital expenditure, regional financial performance.

PENDAHULUAN

¹⁷ Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang ⁵⁵ semakin meningkat dari tahun ke tahun, memberikan gambaran adanya aktivitas perekonomian daerah dapat menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat daerah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Ketercapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memberikan arti secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat juga meningkat. ¹ Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun dapat dipengaruhi dengan desentralisasi fiskal yang tercermin dalam pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dari pemerintah tingkat tinggi kepada pemerintah di tingkat rendah. Pelimpahan wewenang berperan dalam meningkatkan efisiensi publik dalam jangka waktu panjang (Ani dan Dwirandra, 2014). Dengan adanya pemerintahan yang terdesentralisasi, maka ¹ suatu pemerintah daerah diberi tuntutan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat luas di daerahnya. Pelayanan dapat berbentuk fisik dan non fisik. Pelayanan dalam bentuk fisik dapat berupa tersedianya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur dapat berupa jalan, jembatan, pasar, yang dipergunakan

untuk akses percepatan kegiatan perekonomian, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dipergunakan sebagai fasilitas dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, karena dapat meningkatkan sumber daya dan produktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terlepas dari kinerja daerah dalam melakukan pengelolaan atas ⁶ keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, efektif, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta ⁵³ bermanfaat bagi masyarakat (Pasal 4 ayat 1, Permendagri No. 13, 2006). Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah ² dapat diukur dari analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik target maupun realisasinya. Hasil analisis terhadap APBD dapat dipergunakan sebagai dasar informasi dalam membuat kebijakan ² pengelolaan keuangan daerah dan keberhasilan daerah dalam mengelola keuangannya. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dari ³⁰ membandingkan tingkat target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat PAD dengan semua pendapatan daerah, efektivitas dari pendapatan dan belanja, efisiensi

pendapatan dan belanja dan masih banyak lainnya.

Kinerja keuangan daerah dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya penerimaan PAD dalam suatu daerah memberikan gambaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan peningkatan PAD diharapkan pengalokasian belanja daerah juga meningkat. Komponen belanja daerah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang jumlahnya memerlukan anggaran modal yang besar, diperuntukkan untuk meningkatkan infrastruktur, prasarana dan sarana publik. Belanja modal bersifat pengeluaran rutin yang digunakan untuk pembentukan modal, pengeluaran dapat berupa pembelian atau pengadaan dan juga pembangunan aset tetap publik, yang dipergunakan untuk pelayanan publik (Jaeni dan Anggana, 2016). Semakin tinggi belanja modal yang alokasikan dan dilakukan pemerintah daerah, akan mendorong semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan infrastruktur, prasarana dan sarana publik yang memadai, masyarakat akan lebih mudah dalam akses kegiatan ekonomi, sehingga mendorong meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Kajian hasil penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal sebagai variabel moderator telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian – penelitian sebelumnya mendapatkan ketidakkonsistenan hasil. Penelitian Ani dan Dwirandra (2014), mendapatkan hasil bahwa kinerja keuangan daerah yang diprosikan menggunakan rasio kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun kinerja keuangan yang diprosikan menggunakan rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan pendapatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil penelitian Siregar (2016), penelitiannya mendapatkan hasil bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian dan efisiensi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Gunantara (2014); Saraswati dan Ramantha (2018) mendapatkan hasil bahwa belanja modal memperlemah pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil penelitian Siregar (2016), belanja modal tidak memperkuat pengaruh dari kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat topik yang sama untuk menguji kembali kinerja keuangan daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menguji bagaimana belanja modal memoderasi kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah yang diprosikan dengan rasio kemandirian, rasio desentralisasi, dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menganalisis kemampuan belanja modal dalam memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kota dan kabupaten se-eks karesidenan Kediri, Jawa Timur.

LANDASAN TEORI dan HIPOTESIS

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil, atau dapat dikatakan adanya kenaikan output perkapita. Oleh karena itu Indikator keberhasilan dalam pembangunan dapat diprosikan melalui pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya investasi dalam modal aset tetap, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi (Apriana dan Suryanto, 2010). Aset tetap yang berwujud

sarana dan infrastruktur, mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi lancar, distribusi barang dan jasa menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemajuan teknologi dapat mempercepat dan mendukung produktivitas masyarakat, misalnya dengan mesin dan peralatan yang lebih canggih dan modern, maka barang dan jasa yang diproduksi juga meningkat, dan meningkatkan pendapatan.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan capaian kerja pada bidang keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas anggaran beserta realisasinya dalam periode anggaran. Alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dapat menggunakan analisis rasio terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio yang dipergunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah meliputi: rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio desentralisasi, rasio aktivitas dan rasio lainnya. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, ekonomis, dan efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemajuan daerah dapat diukur dari meningkatnya kegiatan perekonomian dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Adapun rasio untuk menganalisis keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi:

1. Rasio Kemandirian

Rasio ini, adalah rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan secara mandiri kegiatan pemerintahannya, dengan cara mengukur rasio pendapatan asli daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma dan Susanto, 2010)

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Desentralisasi

Rasio yang menunjukkan seberapa besar kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Dihitung dengan membandingkan total PAD terhadap Total pendapatan daerah (Bisma dan Susanto, 2010).

$$\text{RasioDesentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

Rasio untuk mengukur apakah kegiatan pemerintah sudah dilaksanakan secara efisien atau belum. Dihitung dengan membandingkan output dan input. 41 Semakin besar output dibandingkan dengan input, maka tingkat efisiensinya semakin tinggi (Mardiasmo, 2004).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja dalam pengeluaran pemerintah yang bersifat rutin dan memerlukan anggaran yang besar. Belanja modal dipergunakan untuk pembelian atau pengadaan dan atau pembangunan aset bersifat tetap yang bernilai ekonomis lebih dari satu periode/ tahun dan digunakan untuk pelayanan publik (Jaeni dan Anggana, 2016). Aset tetap sebagai wujud belanja modal seperti jalan, bangunan, jembatan, pasar, jaringan dan irigasi, gedung atau dapat berwujud prasarana dan sarana serta infrastruktur. Pengalokasian belanja modal secara tepat yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, dapat meningkatkan dan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan lancarnya kegiatan ekonomi masyarakat seperti produktivitas yang tinggi, maka mendorong meningkatnya pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

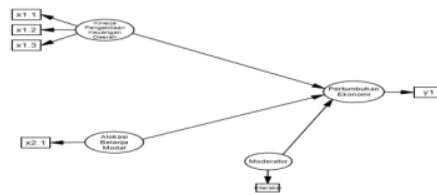
H₁ : Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₂ : Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₃ : Belanja modal sebagai variabel moderator berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian statistik deskriptif. Penelitian dilakukan pada 2 kota dan 5 kabupaten dalam Eks-Karisedenan Kediri, Provinsi Jawa Timur. Obyek penelitian adalah kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dan belanja modal daerah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Situs Dirjen Perimbangan Keuangan pemerintah Daerah (DPJK), yang terdiri dari data pertumbuhan ekonomi, laporan APBD baik target maupun realisasi. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yaitu dengan mengunduh data-data yang diperlukan dalam penelitian pada website BPS yaitu www.bpsjatim.go.id dan website DPJK yaitu pada www.dpjk.depkeu.go.id. Desain penelitian ini disajikan dalam gambar 1 berikut ini:



33
Gambar 1
Desain penelitian

7
Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat dan variabel moderator. Variabel bebas penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah diprosikan atau diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi daerah dan efisiensi keuangan daerah. Rasio kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan total PAD dengan jumlah penerimaan pendapatan dari transfer (pusat dan propinsi) dan jumlah pinjaman daerah, selanjutnya dikalikan 100 persen. Rasio desentralisasi daerah dihitung dengan membandingkan total PAD dengan total pendapatan daerah, kemudian dikalikan 100 persen. Adapun rasio efisiensi dihitung dengan total biaya yang dikeluarkan dengan total pendapatan, dan dikalikan 100 persen.

Variabel terikat penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan perbandingan selisih PDRB tahun sekarang dengan PDRB tahun sebelumnya

dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya, dan kemudian dikalikan dengan 100 persen. Variabel moderator penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal dalam penelitian ini menggunakan alokasi belanja modal yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah belanja modal dengan total belanja daerah. Data alokasi belanja modal didapatkan dari data realisasi belanja modal dengan realisasi total belanja daerah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SEM Moderating, dengan menggunakan software AMOS 21. Tahapan dalam analisis SEM Moderating, yaitu pada tahap pertama menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahap kedua melakukan uji MSEM, dimana belanja modal sebagai moderator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yaitu H_0 diterima dan H_a ditolak jika nilai p-value < 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah yang diprosikan atau diukur dengan rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi daerah dan rasio efisiensi daerah, terhadap

pertumbuhan ekonomi dengan dimoderasi belanja modal. Tahap pertama dalam analisis MSEM adalah melakukan analisis pengaruh kinerja keuangan daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk menghasilkan estimasi λ dan Θ pada variabel kinerja keuangan daerah dan belanja modal. Hasil dari SEM menggunakan Amos 21 estimasi λ dan Θ , disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Error Variance dan Loading Factor

Indikator	Kinerja		Indikator	Alokasi Belanja Modal	
	θ (error variance)	λ (loading factor)		θ (error variance)	λ (loading factor)
x1.1	1,000	0,976	x2.1	1,000	0,981
x1.2	1,000	0,961		1,000	0,981
x1.3	30,716	0,006			
	32,716	1,943			

Langkah selanjutnya adalah mendapatkan λ interaksi yang merupakan loading factor dari variabel laten interaksi dan Θ interaksi yang merupakan error variance dari indikator variabel laten interaksi. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{moderating}} &= (\lambda_{x_{1,1}} + \lambda_{x_{1,2}} + \lambda_{x_{1,3}})(\lambda_{x_{2,1}}) \\ &= (1,943)(0,981) \\ &= 1,906 \\ \theta &= (\lambda_{x_{1,1}} + \lambda_{x_{1,2}} + \lambda_{x_{1,3}})^2 \text{VAR}(\text{kinerja})(\theta_{\text{alokasi}}) \\ &\quad + (\lambda_{x_{2,1}})^2 \text{VAR}(\text{alokasi})(\theta_{x_{1,1}} + \theta_{x_{1,2}} + \theta_{x_{1,3}}) \\ &\quad + (\theta_{x_{1,1}} + \theta_{x_{1,2}} + \theta_{x_{1,3}})(\theta_{x_{2,1}}) \\ &= (1,943)^2(0,001)(1,000) + (0,981)^2(25,043)(32,716) + \\ &= 821,189 \end{aligned}$$

Nilai λ imoderating dari analisis pertama didapatkan hasil 1,906 dan Θ moderating sebesar 821,189 dimasukkan dalam tahap kedua. Hasil akhir MSEM adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Standardized Regression Weight Structural Model

Kausalitas			Standardized Estimate	S.E.	C.R.	P
Pertumbuhan	<--	Kinerja	-0,100	0,015	-1,113	0,266
Pertumbuhan	<--	Alokasi	-0,216	0,017	-2,383	0,017
Pertumbuhan	<--	Moderator	-0,207	0,000	-2,358	0,018

Berdasarkan pada tabel 2 di atas, pengujian hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis pertama

Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_0 : \beta_1 = 0$ kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai $\beta_1 = -0,100$ dengan nilai p-value sebesar 0,266, yang berarti

terima H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien *path* yang negatif menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan daerah tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi menurun.

Hipotesis kedua

Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_0 : \beta_2 = 0$, belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_1 : \beta_2 \neq 0$, belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai $\beta_2 = -0,216$ dengan nilai p-value sebesar 0,017, yang berarti tolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien *path* yang negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat belanja modal tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi menurun.

Hipotesis ketiga

Belanja modal sebagai variabel moderator pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_0 : \beta_3 = 0$ belanja modal sebagai variabel moderator tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_1 : \beta_3 \neq 0$ belanja modal sebagai variabel moderator berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai $\beta_3 = -0,2017$ dengan nilai p-value sebesar 0,018, yang berarti tolak H_0 . Hasil ini menunjukkan bahwa belanja modal sebagai pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti belanja modal dapat sebagai moderator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa hipotesis pertama ditolak. Kinerja keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan bernilai negatif. Tinggi rendahnya penerimaan daerah yang berasal dari PAD, dana perimbangan ataupun yang lain tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah tidak dapat dipergunakan sebagai indikator yang mendorong peningkatan pertumbuhan

ekonomi. Hal ini dimungkinkan bahwa meningkatnya PAD tidak didapatkan dari meningkatnya jumlah produktivitas masyarakat, artinya meningkatnya pendapatan daerah tidak berasal dari aktivitas perekonomian dari masyarakat di daerah tersebut, bisa saja pendapatan daerah mayoritas berasal dari transfer pendapatan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hasil temuan ini mengindikasikan belum maksimalnya pemerintah menggali potensi kekuatan lokal yang dimiliki, seperti mempermudah proses investasi, pengelolaan hasil kekayaan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Siregar (2016) yang menyatakan kinerja keuangan daerah dengan proksi rasio kemandirian dan efisiensi tidak memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Serta penelitian Apriana dan Suryanto (2016), yang menemukan hasil bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis kedua penelitian ini diterima. Belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi bernilai negatif. Peningkatan belanja modal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dikarenakan dengan adanya alokasi untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan prasarana dan sarana yang memadai akan mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Belanja

modal merupakan komponen belanja yang menghasilkan output aset tetap. Aset tetap tersebut pemanfaatannya ada yang secara langsung untuk pelayanan publik seperti jalan, jembatan, pasar dan lainnya. Adapun ada yang secara tidak langsung aset tetap tersebut dimanfaatkan oleh publik, misalnya gedung kantor pemerintahan. Dalam kebijakan publik, belanja modal lebih diprioritaskan untuk pelayanan publik, akan tetapi tidak selalu berhubungan secara langsung terhadap pelayanan publik. Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan negatif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi, dapat dimungkinkan bahwa belanja aset tetap atau modal yang dilakukan pemerintah, tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan publik, yang dapat mendorong meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat. Belanja modal yang dialokasikan tinggi, dipergunakan untuk membangun gedung kantor pemerintahan, sehingga secara tidak langsung tidak mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga meningkatnya belanja modal tidak mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Arini (2016), yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Belanja modal dapat sebagai moderator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dalam melakukan perencanaan pendapatan dan belanjanya dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Dengan perencanaan yang baik terkait estimasi pendapatan dan pengalokasian belanja, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal memperlemah hubungan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dikarenakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan alokasi belanjanya khususnya belanja modal tidak berinteraksi secara langsung kegiatan perekonomian, sehingga walaupun pendapatan dan belanja modal meningkat tetapi tidak mendukung kegiatan ekonomi yang mengakibatkan tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Gunantara (2014); Siregar (2016); Saraswati dan Ramantha (2018), yang mendapatkan hasil bahwa belanja modal memperlemah pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN dan SARAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio desentralisasi, dan rasio efisiensi tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat sebagai variabel moderator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal dalam penelitian ini memperlemah pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah di Eks-Karesidenan Kediri hendaknya memperhatikan estimasi pendapatan dan alokasi belanja modal untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengalokasikan belanja modal yang bersinggungan secara langsung dengan aktivitas ekonomi, misalnya alokasi untuk perbaikan jalan, jembatan, pembangunan pasar.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas daerah penelitian, misalnya lingkup satu provinsi, dengan variabel penelitian yang lebih banyak, misalnya faktor kemajuan teknologi, alokasi DAU yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Apriana, D., dan R. Suryanto. 2010. Analisis hubungan antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan

Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11(1): 68-79.

Ani, NLNP dan AANB Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3): 481-497. ISSN: 2302-8556.

Arini, P.R. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *JRAMB*, 2(2):180-198.

Bisma, I. D. G dan H. Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus*, 4(3).

Gunant¹⁶, P.C. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Provinsi Bali. *E-Jurnal akuntansi*, 7(3).

Jaeni dan G. Anggana. 2016. Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Propinsi Terhadap Belanja Modal. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 5(1): 13-26. ISSN: 1979-4878.

³²Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI.

⁴Saraswati, I.A., dan I. W. Ramantha. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 24(1): 662-686. ISSN: 2302-8556.

Siregar, H.A. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi. Kurs, 1(1): 140-152.

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH YANG DIMODERASI BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	es.scribd.com Internet	28 words — 1%
2	1pelajaran.blogspot.com Internet	27 words — 1%
3	www.jurnal.umsb.ac.id Internet	25 words — 1%
4	ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id Internet	23 words — 1%
5	ejournal.poltektegal.ac.id Internet	20 words — 1%
6	repo.unand.ac.id Internet	18 words — 1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet	17 words — 1%
8	oribilqisti15.wordpress.com Internet	16 words — < 1%
9	Wiwin Indrayanti. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di	15 words — < 1%

-
- 10 www.rastika.com
Internet 15 words — < 1%
-
- 11 repository.its.ac.id
Internet 14 words — < 1%
-
- 12 sutiyah0.blogspot.com
Internet 14 words — < 1%
-
- 13 Annisa Siti Fathonah, Dadang Hermawan.
"Estimasi Pengaruh Faktor Internal Bank dan
Stabilitas Makroekonomi terhadap Profitabilitas dengan
Mediasi Rasio Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat
Indonesia", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2020
Crossref 13 words — < 1%
-
- 14 docplayer.net
Internet 13 words — < 1%
-
- 15 pesquisa.bvsalud.org
Internet 13 words — < 1%
-
- 16 Justonly Lengkong, David P.E. Saerang, Stanly
Alexander. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN
KOTA PROPINSI SULAWESI UTARA", GOING CONCERN : JURNAL
RISET AKUNTANSI, 2013
Crossref 12 words — < 1%
-
- 17 contohaku1.blogspot.com
Internet 11 words — < 1%
-
- 18 simki.unpkediri.ac.id
Internet

11 words — < 1%

19 Baldric Siregar, Rudy Badrudin. "The Evaluation of Fiscal Decentralization in Indonesia Based on the Degree of Regional Autonomy", *Journal of Reviews on Global Economics*, 2019
10 words — < 1%
Crossref

20 Marsye H Kaat, Paulus - Kindangen, Debby Ch. Rotinsulu. "ANALISIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2010–2015", *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 2019
10 words — < 1%
Crossref

21 journal.uim.ac.id
Internet
10 words — < 1%

22 jurnal.poltekstpaul.ac.id
Internet
10 words — < 1%

23 jurnal.usu.ac.id
Internet
10 words — < 1%

24 pusbindiklatren.bappenas.go.id
Internet
10 words — < 1%

25 130.179.64.208
Internet
9 words — < 1%

26 Christian D. Sumual, Lintje Kalangi, Natalia Y. T. Gerungai. "ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON", *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 2017
9 words — < 1%

27 Daiyana Natalia Balo, Hendrik Manossoh, Jessy D. L Warongan. "Evaluasi pelaksanaan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *Indonesia Accounting Journal*, 2020

Crossref

9 words — < 1%

28 Darti Djuharni, Intan Novitasari. "Pengungkapan CSR Tentang Kinerja Keuangan dan Lingkungan", *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2019

Crossref

9 words — < 1%

29 Veybe Walintukan, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko. "PENGARUH DESENTRALISASI, PERTUMBUHAN PAD DAN KEMANDIRIAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA DI PROVINSI SULUT TAHUN 2009-2017", *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 2019

Crossref

9 words — < 1%

30 Yohannes Cosmas Simbolon, Azhar Maksum, Erwin Abubakar. "Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2020

Crossref

9 words — < 1%

31 journal.feb.unmul.ac.id

Internet

9 words — < 1%

32 journal.sebi.ac.id

Internet

9 words — < 1%

33 www.researchgate.net

Internet

9 words — < 1%

34 Andre Hendry Karwur, Ventje Ilat, Sherly Pinatik. "PENERAPAN VALUE FOR MONEY UNTUK MENILAI KINERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2014

Crossref

8 words — < 1%

35 Denny D. Sangkaen, Vecky A.J. Masinambow, Daisy S.M. Engka. "ANALISIS PENGARUH INFLASI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KOTA MANADO", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019

Crossref

8 words — < 1%

36 Moch Adam Ferdiansyah. "Dtereminan Belanja Modal Bidang Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2020

Crossref

8 words — < 1%

37 Rahmi Hajriyanti, Ester Ester. "Internet Usage, Financial Sector Development, and Economic Growth: A Cross-District Data in Aceh", Jurnal EMT KITA, 2019

Crossref

8 words — < 1%

38 Yulistia Yulistia. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Serta Dampak Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi)", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2020

Crossref

8 words — < 1%

39 blog.umy.ac.id

Internet

8 words — < 1%

40 cesmaa.org

Internet

8 words — < 1%

41 digilib.uinsby.ac.id

Internet

8 words — < 1%

42 e-journal.unipma.ac.id
Internet

8 words — < 1%

43 jurnal.uisu.ac.id
Internet

8 words — < 1%

44 jurnalhukumargumentum.wordpress.com
Internet

8 words — < 1%

45 metromedia-education-center.co.id
Internet

8 words — < 1%

46 orange4k.com
Internet

8 words — < 1%

47 www.kalbar.go.id
Internet

8 words — < 1%

48 zonasultra.com
Internet

8 words — < 1%

49 Mohammad Bayu Moha, Anderson Guntur
Kumenaung, Debby Christina Rotinsulu.

7 words — < 1%

"PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL STUDI KASUS PADA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2004-2013",
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH,
2019

Crossref

50 Muhammad Rusdi, Barika Barika, Izharudin
Izharudin, Lela Rospida. PARETO : Jurnal Ekonomi
dan Kebijakan Publik, 2019

7 words — < 1%

Crossref

51 ejournal.unklab.ac.id Internet 7 words — < 1%

52 griyapengadaan.blogspot.com Internet 7 words — < 1%

53 Grace G Lewedalu, Lintje Kalangi, Jessy D. L. Warongan. "EVALUASI PENATAUSAHAAN, PENYUSUNAN, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2016
Crossref

54 Jesiska C Karwur, Ventje Ilat, Jessy D.L Warongan. "FLYPAPER EFFECT ATAS DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018
Crossref

55 idoc.pub Internet 6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF